

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya digunakan untuk mencapai tujuan suatu bangsa dan merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan suatu Negara, karena dapat mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat memberi perhatian lebih dibidang kesehatan dan pendidikan. Salah satu langkah dalam mengubah kehidupan masyarakat adalah pembangunan. Khususnya, perubahan yang lebih baik dari status saat ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dimana indikatornya adalah Kebijakan Pemerintah dalam Pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan. Adam Smith menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam perekonomian pembangunan, yang berpendapat bahwa skala ekonomi dan modal manusia merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa.¹

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) *United Nations Development Programme* (UNDP) yang pertama kali memperkenalkan IPM pada tahun 1990. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengubah beberapa indikator IPM yang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan

¹ Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, Nurul Huda, “*Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014- 2018 dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, 2020, Hal.1

dalam perhitungan IPM yaitu Angka Melek Huruf diubah menjadi Angka Harapan Lama sekolah²

Tiga indikator yang digunakan oleh IPM untuk menilai kualitas hidup penduduk setempat yaitu : perekonomian (daya beli), kesehatan, dan pendidikan. Peningkatan ketiga indikator ini diyakini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketiga indikator yang mempengaruhi IPM tidak berdiri sendiri, sebaliknya, mereka berdampak satu sama lain. Dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain. termasuk kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, yang semuanya berdampak pada ketersediaan lapangan kerja³

Peningkatan IPM seiring dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kesejahteraan dari sisi kesehatan dilihat pada angka harapan hidup, dari sisi pendidikan dilihat pada angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dari sisi ekonomi dilihat Pengeluaran perkapita. Berikut tabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2019–2023:

Tabel 1 1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Tahun 2019–2023 (Metode Baru)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kerinci	70,95	71,21	71,45	71,99	72,54
2	Kab. Merangin	69,07	69,19	69,53	69,98	70,81

² BPS. “*Indeks Pembangunan Manusia*” 2018.BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id> di akses 26-November - 2024

³ Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, “*Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*”,(Surabaya, The 3rd National Conference UKWMS, 2009), Hal.3

3	Kab. Sarolangun	69,72	69,86	70,25	70,89	71,29
4	Kab. Batanghari	69,67	69,84	70,11	70,51	71,02
5	Kab. Muaro Jambi	69,01	69,18	69,55	70,18	71,04
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	63,92	64,43	64,91	65,77	66,65
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	67,54	67,54	68,16	68,79	69,35
8	Kab. Tebo	69,02	69,14	69,35	69,78	70,63
9	Kab. Bungo	69,86	69,92	70,15	70,55	71,06
10	Kota Jambi	78,26	78,37	79,12	79,58	80,15
11	Kota Sungai Penuh	75,36	75,42	75,7	76,17	75,65
	Provinsi Jambi	71,26	71,29	71,63	72,14	72,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Jambi

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi yang memiliki nilai IPM diatas nilai IPM Provinsi Jambi adalah Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Nilai IPM yang diperoleh Provinsi Jambi dan seluruh Kabupaten/Kota berada dalam kategori menengah keatas adalah capaian Nilai $63 \leq \text{IPM} < 80$

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi selalu mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya IPM Provinsi Jambi. Pada tahun 2023 IPM Provinsi Jambi telah mencapai 72,77. Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin dibandingkan dengan IPM Provinsi Jambi pada tahun 2022 yang sebesar 72,14. Sejak tahun 2019 status pembangunan manusia di Provinsi Jambi telah mencapai level “sedang”.

IPM Provinsi Jambi pada tahun 2024 tumbuh sebesar 1,51 dibandingkan tahun 2019.

Kabupaten dengan tingkat IPM terendah di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang memiliki nilai IPM sebesar 66,65 pada tahun 2023. Meskipun demikian, kabupaten ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2019–2023, dengan kenaikan sebesar 2,73 poin dari nilai awal sebesar 63,92 pada tahun 2019. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan di berbagai aspek pembangunan manusia di kabupaten tersebut. Untuk dapat mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakanlah suatu indikator komposit yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁴

Indeks Pembangunan Manusia merupakan konsep pembangunan manusia yang memperhatikan kualitas hidup masyarakat untuk memberikan pilihan-pilihan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, pendidikan dan kemampuan dalam meningkatkan daya beli. Dengan mengedepankan Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran adalah peran alokatif dengan peran ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada agar optimal dan efisien.

Bentuk nyatanya adalah pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal pengelolaan fiskal. Fiskal merupakan kebijakan yang dibuat

⁴ Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau”, Jurnal Ekonomi, Vol.22, No.2, 2014

pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.⁵ Sebagaimana diketahui bahwa cakupan fiskal ini sangat luas, maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka fiskal yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Sementara kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini diarahkan pada parameter yang sudah menjadi parameter internasional dalam hal kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam ilmu ekonomi sektor pendidikan dan kesehatan telah diyakini memainkan peran yang vital dalam pembangunan. Produktivitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan yang berpengaruh pada keberhasilan pendidikan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.⁶

Pemerintah harus menyediakan sumber pendanaan yang cukup bagi pembangunan manusia dalam bentuk kebijakan pengeluaran anggaran yang tepat sasaran. Menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan

⁵ Muhamad Sidik, "Pengelolaan Aset dan Kebijakan Fiskal," *DJKN*, 22 September 2017, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12611/Pengelolaan-Aset-danKebijakan-Fiskal.html>, diakses pada 19 Januari 2025

⁶ Sodik, J., 2007, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12. No. 1, UVN Veteran Yogyakarta, April 2007, hal.27-36

akhir dari proses pembangunan diharapkan dapat menciptakan peluang-peluang yang secara langsung menyumbang upaya memperluas dan meningkatkan kemampuan manusia dan kualitas kehidupan mereka, antara lain melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar dan jaminan sosial. Sesuai dengan teori IPM, yang menekankan pentingnya peran pemerintah didalam kedua sektor tersebut.

Pemerintah harus mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan dan 10% untuk sektor kesehatan dari total APBN mau pun APBD sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan⁷ dan UU No 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan⁸. Kriteria-kriteria khusus mutlak di syaratkan agar penerapan ekonomi islam sesuai dengan yang sudah digariskan agar tujuan dari penerapan ekonomi islam dapat tercapai.

Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh resources yang ada dimuka bumi, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada dimuka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah dalam QS.Al-Jatsiyat :45:13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49.

⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 171.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁹

Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Jatsiyat: 45:13, Allah telah menundukkan seluruh ciptaan-Nya untuk kemaslahatan umat manusia. Ayat ini menggambarkan bahwa segala sumber daya alam, baik yang ada di langit maupun di bumi, sengaja diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks IPM, pengelolaan sumber daya yang baik berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.¹⁰ Sumber daya alam yang dikelola secara efektif dapat menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.¹¹ Hal ini sejalan dengan tujuan dasar dari IPM, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh.

Tanggung jawab umat Muslim sebagai penggerak ekonomi Islam perlu dipahami secara lebih luas, agar tidak terjebak dalam pandangan sempit tentang profesi atau pekerjaan tertentu. Kesadaran ini penting agar

⁹Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, QS : Jatsyiah 13, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012),

¹⁰ Eka Santi Agustina dan Jumai Latte, "Pengaruh Potensi Sumber Daya Alam dan Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Desa Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 2, Mei-Agustus 2023, hal.19

¹¹ Nurwino Wajib, "Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan," *Bappeda*, 30 Mei 2017, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>, diakses pada 19 Januari 2025.

seluruh umat Muslim aktif berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi Islam.¹² Dengan demikian, "vitalitas" sumber daya manusia ekonomi Islam di Indonesia dapat mencapai kondisi yang ideal, sehingga mereka dapat menjalankan amanah sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan, tanpa menghilangkan nilai-nilai keterbukaan..

Perkembangan ekonomi Islam saat ini menunjukkan kemajuan yang mengesankan, yang sebenarnya merupakan hasil dari keberhasilan individu-individu yang terlibat di dalamnya.¹³ Dalam konteks ini, sumber daya manusia di sektor ekonomi Islam memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai dan prinsip syariah dalam setiap aktivitas mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlakuan yang adil dan transparan kepada mereka, serta mendorong setiap individu untuk terus mengembangkan potensi, keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai ekonomi Islam.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun masih terdapat beberapa kesenjangan yang belum dijawab secara komprehensif, khususnya dalam konteks Provinsi Jambi. Penelitian oleh Ainun Mardiyah (2019) memang mengangkat isu yang sama di Provinsi Jambi, namun hanya terbatas pada variabel PDRB, kemiskinan,

¹² A. Jajang W. Mahri, Cupian, M. Nur Rianto Al Arif, Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarak, Muhamad Fajri, Azizon, dan Aas Nurasyiah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Edisi Pertama, Juni 2021, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, hal.vii

¹³ Ibid,hal.195

pengeluaran pendidikan, dan kesehatan, serta belanja modal. Penelitian ini belum mencakup peran pengeluaran infrastruktur secara spesifik, padahal infrastruktur memegang peranan penting dalam memperlancar akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.¹⁴ Sementara itu, penelitian Rosnani Siregar dkk. (2018) di Provinsi Sumatera Utara hanya menyoroti dua sektor, yaitu pendidikan dan kesehatan, tanpa melibatkan sektor infrastruktur, dan dilakukan di provinsi yang memiliki karakteristik sosial dan fiskal yang berbeda dengan Jambi.¹⁵

Lebih lanjut, penelitian oleh Zudrun Maryozi dkk. (2020) memang telah mengkaji tiga sektor utama (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), namun fokus wilayahnya adalah Provinsi Riau. Hasil dari penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan langsung ke Provinsi Jambi yang memiliki tantangan pembangunan wilayah yang berbeda, terutama ketimpangan antara kabupaten/kota.¹⁶ Penelitian oleh Clarisa Sasti Bintoro (2023) di Jawa Timur juga menggunakan pendekatan data panel dan mencakup ketiga sektor tersebut, namun kondisi sosial-ekonomi

¹⁴ Ainun Mardiyah, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2010–2017* (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 64.

¹⁵ Rosnani Siregar, Hamni Fadlilah Nasution, dan Siti Fatimah Tanjung, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 6, no. 1 (Januari-Juni 2018)

¹⁶ Zudrun Maryozi, B. Isyandi, dan Ando Fahda Aulia, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM di Provinsi Riau*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 18 No. 1, 2020

serta distribusi anggaran di Jawa Timur tentu tidak identik dengan Provinsi Jambi.¹⁷

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan riset tersebut dengan melakukan analisis lebih lanjut mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi selama periode 2019-2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tahun 2019-2023?

¹⁷ Clarisa Sasti Bintoro, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018–2022," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11 No. 1 (2023):

4. Bagaimana pengaruh simultan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tahun 2019–2023?

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian ini, penulis perlu menetapkan batasan masalah. Batasan ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi dari tahun 2019 hingga 2023 berdasarkan kabupaten/kota. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tiga faktor yang berpengaruh terhadap IPM, yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Untuk memastikan kelengkapan data, penulis akan menggunakan data panel yang merupakan kombinasi antara data time series dan data cross section, dengan cakupan penelitian ini mencakup 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang diamati selama periode 5 tahun.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tahun 2019-2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh simultan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tahun 2019-2023.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta untuk meraih gelar sarjana.
2. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi karya ilmiah yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi peneliti serta pihak-pihak yang berminat dalam topik penelitian yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam menganalisis dan memahami hasil penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, sumber serta jenis data, teknik dan instrumen pengumpulan data, serta variabel penelitian dan definisi operasional.

